

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi adalah sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara. Tujuan pembangunan itu sendiri ialah supaya dapat menurunkan tingkat pengangguran, diharapkan pembangunan tersebut memberikan dampak yang positif bagi masyarakat yaitu dengan meningkatkan lapangan pekerjaan serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kemiskinan adalah sebuah masalah dalam suatu daerah dan menjadi faktor penghambat dalam pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, yang menjadi salah satu indikator utama keberhasilan dalam pembangunan nasional yaitu menurunkan angka atau tingkat kemiskinan. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik dan terus menerus untuk mencapai tujuan dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera.

Kemiskinan juga merupakan muara dari masalah sosial lainnya yang ada di lingkungan masyarakat. Keberadaan penduduk miskin dalam suatu wilayah tidak akan membawa kemakmuran bagi wilayah tersebut sehingga wajib diberantas. Oleh karena itu, pemberantasan kemiskinan telah menjadi tantangan utama dalam pembangunan, karena pembangunan ekonomi bukan terletak pada pendapatan yang dihasilkan oleh suatu wilayah, tetapi pada peningkatan kualitas kehidupan penduduk. Kemiskinan telah menjadi masalah atau persoalan global yang kompleks dan tak kunjung usai, dikarenakan kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di semua negara yang sedang berkembang. Termasuk di negara Indonesia, dimana kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi dan multi sektor yang menyangkut masalah harkat dan martabat manusia. Kemiskinan itu sendiri memberikan dampak yang negatif, selain timbulnya masalah-masalah sosial, kemiskinan juga dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara. Kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pembangunan ekonomi menjadi

lebih besar, sehingga secara tidak langsung akan menghambat pembangunan ekonomi. Persoalan kemiskinan menjadi target kebijakan pembangunan di setiap negara. Untuk mengatasi masalah kemiskinan diperlukan berbagai bentuk upaya pembangunan dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan pembangunan tersebut. Permasalahan yang dihadapi oleh banyak negara yang menyangkut kesejahteraan masyarakat adalah ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Suliswanto, 2010). Kesejahteraan bisa diartikan salah satunya dengan tingkat kemiskinan penduduk. Kesejahteraan itu sendiri memiliki hubungan yang negatif terhadap tingkat kemiskinan, semakin rendah tingkat kemiskinan maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan penduduk.

Pembangunan harus dilihat sebagai proses multidimensi yang mencakup tidak hanya pembangunan ekonomi, namun juga mencakup perubahan-perubahan utama dalam struktur sosial, perilaku, dan kelembagaan. Tujuan utama pembangunan ekonomi selain berupaya untuk menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, pembangunan harus juga berupaya untuk menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran atau upaya menciptakan kesempatan kerja bagi penduduk sebab dengan kesempatan kerja masyarakat akan memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Teori lingkaran setan kemiskinan yang dikemukakan oleh Nurkse (1953), mengatakan bahwa negara miskin itu miskin karena dia miskin. Adanya keterbelakangan, ketidak sempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya. Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Fenomena seperti ini biasa terjadi dikarenakan tingginya tingkat pengangguran yang menyebabkan rendahnya pendapatan masyarakat bahkan dalam memenuhi kebutuhan pokok baik papan, sandang, maupun pangan dan juga rendahnya kualitas sumber daya manusia itu sendiri.

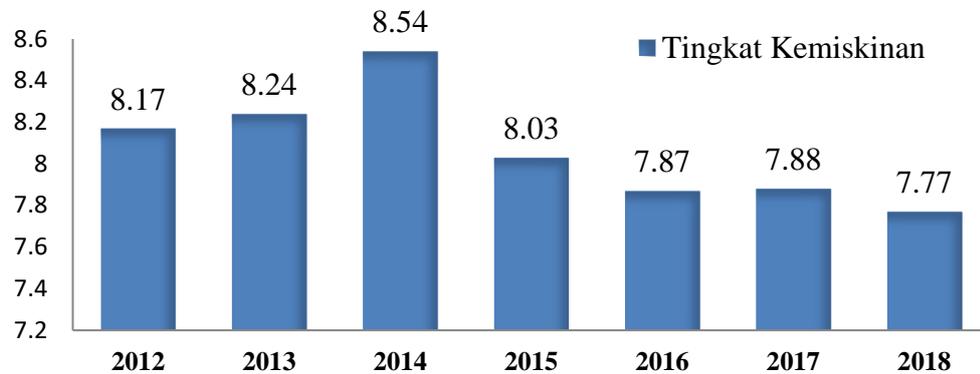
Pengangguran dapat mengurangi tingkat kemakmuran, semakin turun tingkat kemakmuran maka akan menimbulkan masalah lain yaitu kemiskinan.

Dalam penelitian ini pendapat Nurkse digambarkan dengan kekurangan modal yang berarti kurangnya pengeluaran pemerintah. Produktivitas digambarkan dengan tingkat pengangguran, dan ketidak sempurnaan pasar digambarkan dengan pertumbuhan ekonomi. Tingginya tingkat pengangguran, kurangnya pengeluaran pemerintah dan rendahnya pertumbuhan ekonomi dapat memicu naiknya angka kemiskinan.

Tingkat kemiskinan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah tingkat pengangguran, pengangguran merupakan suatu persoalan yang menjadi penyakit dalam perekonomian karena pengangguran bisa menimbulkan tingkat kriminalitas yang tinggi, sehingga kondisi suatu daerah tidak aman bukan hanya dari segi ekonomi namun dari segala bidang yang lain seperti keamanan dan juga tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah di mana masih kurangnya tingkat pendapatan masyarakat dibandingkan daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat dan rendahnya sumber daya manusia pada suatu daerah merupakan salah satu faktor juga dalam mempengaruhi kemiskinan dan tingkat pengangguran.

Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia, dimana Provinsi Kalimantan Barat membawahi 14 Kabupaten/Kota yang mempunyai tingkat kemiskinan yang berbeda-beda. Pada tabel 1.1 diketahui bahwa tingkat kemiskinan pada setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat selama kurun waktu 2012-2018 cenderung mengalami berfluktuasi. Hal ini disebabkan tingkat pengangguran yang masih tinggi dan laju pertumbuhan ekonomi yang lambat.

Dapat dilihat pada Provinsi Kalimantan Barat, tingkat kemiskinan tertinggi yaitu berada pada tahun 2014 dengan tingkat kemiskinan sebesar 8.54%, sedangkan tingkat kemiskinan terendah berada pada tahun 2018 dengan tingkat kemiskinan sebesar 7.77%.



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat

Gambar 1.1
Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2012-2018 (dalam persen)

Banyak faktor yang menyebabkan tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat mengalami fluktuasi, salah satunya yaitu pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan. Unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat terwujud. Pengangguran akan menimbulkan efek mengurangi pendapatan masyarakat, dan hal tersebut akan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah tercapai. Semakin turunnya tingkat kemakmuran akan menimbulkan masalah lain yaitu kemiskinan (Sukirno, 2010).

Angkatan kerja yang tumbuh dengan cepat tentu akan menambah beban tersendiri bagi perekonomian yakni menciptakan atau perluasan lapangan pekerjaan. Jika lowongan kerja tidak mampu menampung semua angkatan kerja baru maka sebagian angkatan kerja baru itu akan memperpanjang barisan pengangguran yang sudah ada (Dumairy, 2006). Jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2012-2018 terlihat berfluktuatif.



Sumber : BPS Kalimantan Barat

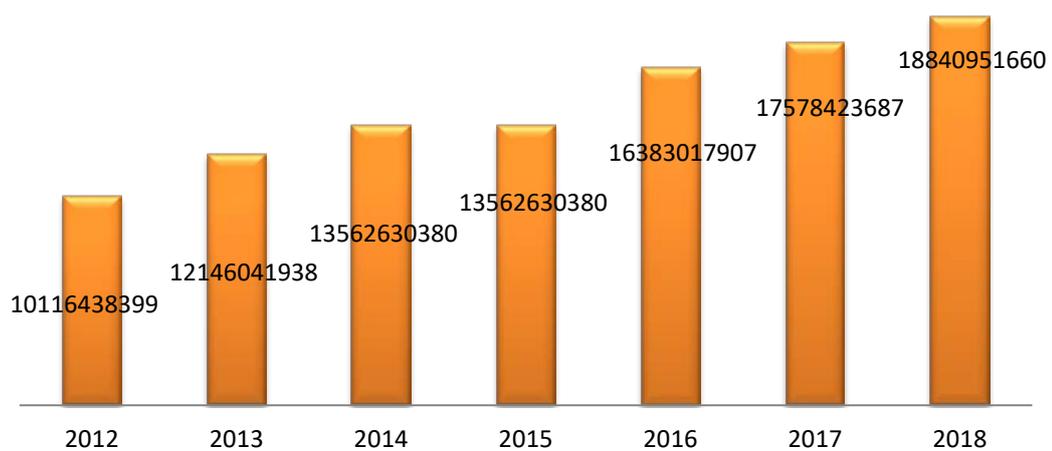
Gambar 1.2
Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2012-2018 (dalam persen)

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Barat cenderung berfluktuasi. Tingkat pengangguran tertinggi berada pada tahun 2015 sebesar 5,15 persen sedangkan tingkat pengangguran terendah berada pada tahun 2013 sebesar 3,03 persen. Perubahan ini disebabkan meningkatnya angkatan kerja dan kurangnya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan.

Upaya menurunkan tingkat pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan adalah sama pentingnya. Jika masyarakat tidak menganggur berarti mempunyai pekerjaan dan penghasilan dan dengan penghasilan yang dimiliki dari bekerja diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Jika kebutuhan hidup terpenuhi, maka tidak akan miskin sehingga dikatakan dengan tingkat pengangguran rendah (kesempatan kerja tinggi) maka tingkat kemiskinan juga rendah (Yacoub, 2012)

Persoalan kemiskinan memang menjadi salah satu target kebijakan pembangunan di setiap negara. Untuk mengatasi kemiskinan diperlukan berbagai upaya pembangunan dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan pembangunan tersebut. Usaha yang telah dilakukan tersebut dapat dilihat dalam bentuk peningkatan pengeluaran pemerintah.

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat cenderung mengalami peningkatan disetiap tahunnya, dimana pada tahun 2012 sebesar Rp. 10.116.438.399 dan merupakan pengeluaran pemerintah terendah. Jumlah pengeluaran pemerintah tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp. 18.840.951.660.



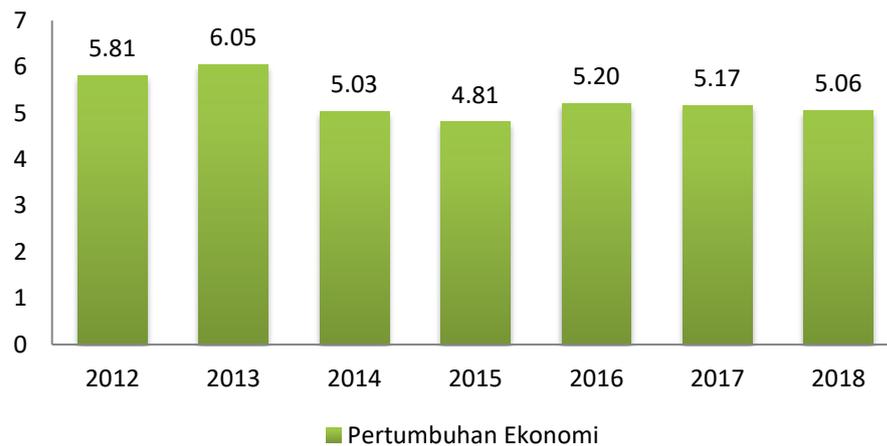
Sumber : BPS Kalimantan Barat

Gambar 1.3
Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2012-2018 (dalam rupiah)

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, penanggulangan kemiskinan menjadi perhatian utama pembangunan nasional dan daerah, terutama sejak diberlakukannya undang-undang tentang pemerintahan daerah. Dengan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta program pembangunan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan setempat, dengan tujuan dapat menurunkan jumlah kemiskinan (Pratama dan Utama, 2019).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu syarat suatu bangsa untuk memajukan bangsanya atau menaikkan kesejahteraan warganya. Walaupun pertumbuhan ekonomi tidak bisa berdiri sendiri untuk mengurangi kemiskinan namun pertumbuhan ekonomi menjadi satu faktor yang tidak bisa ditinggalkan

dalam mengentaskan kemiskinan. Menurut Rostow pertumbuhan ekonomi adalah suatu transformasi dari suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern melalui tahapan sebagai (1) Masyarakat tradisional; (2) Prasyarat lepas landas; (3) Lepas landas; (4) Tahapan kematangan; (5) Masyarakat berkonsumsi tinggi.



Sumber: BPS Kalimantan Barat

Gambar 1.4
Pertumbuhan Ekonomi di
Provinsi Kalimantan Barat (dalam persen)

Kondisi pertumbuhan ekonomi Kab/Kota Provinsi Kalimantan Barat mengalami fluktuasi. Pertumbuhan ekonomi Kab/Kota Provinsi Kalimantan Barat tertinggi berada pada tahun 2013 yaitu 6,05% dan yang terendah ber ada pada tahun 2015 yaitu 4,81%. Rendahnya laju pertumbuhan ekonomi yang masih dirasakan oleh sebagian kecil di Kabupaten/Kota merupakan tanggung jawab pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini merupakan masalah yang menarik untuk dikaji mengingat Provinsi Kalimantan Barat memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah dan masih memungkinkan untuk diolah dengan lebih optimal bahkan letak geografis di masing-masing Kabupaten/Kota dinilai memiliki arti strategis tersendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Pengeluaran

Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat”.

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1. Pernyataan Masalah

Masalah kemiskinan terjadi di negara maju maupun berkembang dan masalah tersebut masih menjadi perhatian khusus termasuk di Indonesia. Berdasarkan data tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat selama dalam kurun waktu 2012 sampai 2018 mengalami fluktuasi. Penyebabnya adalah belum meratanya hasil dari usaha pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan keseluruhan daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Untuk itu diperlukan penelitian yang lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat agar dapat diketahui faktor-faktor yang perlu dipacu untuk mengatasi masalah kemiskinan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka, Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi.

1.2.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pernyataan masalah diatas dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat?
2. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pernyataan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian diatas adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat?

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat?
3. Untuk menguji dan menganalisis pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat?

1.4. Kontribusi Penelitian

1.4.1. Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu ekonomi khususnya yang berkaitan dengan teori kemiskinan. Selain itu dapat juga dijadikan bahan referensi bagi peneliti lainnya yang mengangkat masalah mengenai kemiskinan dan hal-hal yang mempengaruhinya.

1.4.2. Kontribusi Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti untuk menerapkan teori yang diperoleh sebelumnya.

b. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi untuk pemerintah dalam memperbaiki kinerja untuk pembangunan ekonomi yang lebih baik dan mengatasi masalah kemiskinan.